

13 Feb '18.

Toleransi Antarumat tidak Bisa Ditawar

BANGSA Indonesia sudah berpuluh-puluh tahun hidup bersama dengan beragam keyakinan. Konstitusi bangsa ini pun menjamin kebebasan beragama.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada tempat di negeri ini bagi orang yang tidak mampu bertoleransi.

Hal itu dikemukakannya saat menanggapi terjadinya penyerangan terhadap pemuka agama beberapa waktu belakangan ini.

"Sekali lagi, tidak ada tempat bagi mereka yang tidak mampu bertoleransi di negara kita Indonesia. Apalagi dengan cara-cara kekerasan, berujar saja tidak, apalagi dengan cara-cara kekerasan," tegas Presiden di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, kemarin.

Presiden menambahkan penyerangan tidak hanya terjadi di negeri ini, tapi juga di hampir semua negara akibat keterbukaan informasi.

Sebelumnya dilaporkan terjadi sejumlah aksi penyerangan bernuansa sentimen keagamaan.

Penyerangan terbaru menimpa jemaat Gereja St Lidwina di Desa Trihanggo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Minggu (11/2). Presiden pun memerintahkan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas.

Menko Polhukam Wiranto mengatakan hasil penyelidikan Polri mengenai insiden di Sleman masih perlu pendalaman.

"Dia (pelaku) jaringan teroris. Bisa saja *lone wolf*

dan bisa juga dalam konteks jaringan. Ini baru ada satu pendalaman," ujar Wiranto di Jakarta, kemarin.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan anggotanya tengah melakukan penyelidikan atas peristiwa yang terjadi. Selain wajib bekerja cepat, penyelidikan sebagai bukti penindakan harus berdasarkan fakta dan hukum berlaku sehingga spekulasi yang banyak berkembang di tengah masyarakat bisa segera diredam.

Presiden
Joko Widodo
menegaskan
tidak ada tempat
di negeri ini
bagi orang yang
tidak mampu
bertoleransi.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Yati Andriyani meminta masyarakat tidak terpancing dengan rangkaian peristiwa kekerasan itu.

Ia menambahkan penyerangan terhadap umat ataupun pemuka agama yang terjadi belakangan ini telah mengoyak keprihatinan atas kebebasan beragama dan beribadah di Tanah Air. Tindakan itu merupakan bentuk teror yang harus diungkap Polri dengan sistematis, termasuk motif dan aktor utamanya. (Nur/Gol/Sru/X-6)